

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ilham, dkk. (2020). *Dasar-dasar Kewirausahaan*. Sidoarjo: PT Berkat Mukmin Tinggi.
- J, Lexy Maleong. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kamilah, Anita. (2013). *Bangun Guna Serah (Build operate and Transfer/ BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria Hukum Perjanjian dan Hukum Publik)*. Bandung: CV Keni Media
- Liauw, Gasper. (2015). *Administrasi Pembangunan Studi Kajian PKL*. Bandung: Refika Aditama.
- Miru, Ahmad. (2008). *Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- R, Marbun. (2011). *Kasus Hukum*. Jakarta: Visimedia.
- Permadi, Gilang. (2007). *Pedagang Kaki Lima*. Jakarta: Yudhistira.
- S, Salim, H. (2012). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Salim. (2008). *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*. Jakarta: Sinar Gafika.
- Setiawan, I Ketut Oka. (2014). *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. Jakarta: FH Utama.
- Wibowo. (2007). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Parsada.
- Widjaja, Gunawan. (2014). *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zakiah. (2015). *HUKUM PERJANJIAN Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Lentera Kreasindo.

Jurnal

- Ainita, Okta. (2017). *Analisis Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung*. Jurnal Pranata Hukum, hal. 55.
- Bastiana, dkk. (2019). *Karakteristik Umum dan Tingkat Pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Makassar*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Butarbutar, Wilbert Ramonray. (2019), *Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Harsan, Ifan Wardani. (2017). *Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Pasar di Pasar Segiri Kota Samarinda*. eJournal Ilmu Pemerintahan Vol. 5. No. 1.
- Hasrul Muh. (2017). *Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah*. Amanna Gappa, Vol. 25. No. 2.
- Muhtarom. (2014). *Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*. Kartasura: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- R, Khairandy. (2013). *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. FH UII Press.
- Satararuddin, dkk. (2020). *Analisis Kualitatif Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kota Mataram*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Mataram: Elastisitas, Vol. 2. No. 2.
- Susanti. (2018). *Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan di Kota Batam*. UIB Repository, hal. 72.

Peraturan-peraturan

- Peraturan Bupati Pacitan Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Pacitan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Skripsi

Arifin, Febrinta Putri. (2012). *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Oleh Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pacitan*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

Putri, Rizki Maulida. (2018). *Analisis Sistem Perjanjian Pada Penyelesaian Eksekusi Harta Pedagang Kaki Lima Dari Sitaan Satpol Pp Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Wawancara

Samsul Hadi, S.Sos., M.H., Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Pacitan, 2022, *Wawancara Pribadi*, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pacitan.

Pedagang kaki lima, 2022, *Wawancara Pribadi*, Kawasan Alun-Alun Kabupaten Pacitan.

Website

4 Syarat Sah Perjanjian di Mata Hukum. Dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-lt6273669575348/?page=2> diakses pada 20 September 2022 pukul 21.52 WIB.

Apa pengertian pelanggaran dan apa pula pengertian menurut para ahli? Apa pengertian – Brainly.co.id. Dalam <https://brainly.co.id/tugas/13809543#> diakses pada 23 September 2022 pukul 11.42 WIB.

Ayat Al-Qur'an tentang ketaatan. Dalam <https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html#!/history> diakses pada 27 Maret 2023 pukul 09.55 WIB.

Kasus Hukum Perdata: Pengertian, Sanksi, hingga Sejarahnya Kemunculannya di Indonesia. Dalam <https://voi.id/berita/39150/kasus-hukum-perdata-pengertian-sanksi-hingga-sejarahnya-kemunculan-di-indonesia> diakses pada 23 September 2022 pukul 11.44 WIB.

Pedagang Kaki Lima – Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima diakses pada 09 februari 2023 pukul 17.32 WIB

Perbedaan dan Contoh Hukum Perdata dan Pidana – Biro Administrasi Registrasi
Kemahasiswaan dan Organisasi. Dalam
<https://barki.uma.ac.id/2021/11/18/perbedaan-dan-contoh-hukum-perdata-dan-pidana/> diakses pada 23 September 2022 pukul 11.45 WIB.